

## KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

Mengingat : Peraturan Pemerintah yang bertujuan mengatur pembukaan dan penegerian sekolah

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikau beberapa Si.TP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 034/O/1997;
  - d. Nomor 035/O/1997;
  - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegarian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

1	2	3	4	5	6	7
11.	SLTP Negeri 2 Ciwariningin	-	Ciwariningin	Kabupaten Cirebon		
12.	SLTP Negeri 2 Susukan	-	Susukan	Kabupaten Cirebon		
13.	SLTP Negeri 5 Banjarsari	-	Banjarsari	Kabupaten Ciamis		
14.	SLTP Negeri 2 Sukadana	-	Sukadana	Kabupaten Ciamis		
15.	SLTP Negeri 6 Padaherang	-	Padaherang	Kabupaten Ciamis		
16.	SLTP Negeri 4 Pangandaran	-	Pangandaran	Kabupaten Ciamis		
17.	SLTP Negeri 3 Haurgeulis	-	Haurgeulis	Kabupaten Indramayu		
18.	SLTP Negeri 2 Losarang	-	Losarang	Kabupaten Indramayu		
19.	SLTP Negeri 2 Lemahabang	-	Lemahabang	Kabupaten Karawang		
(20)	SLTP Negeri 2 Tempuran	-	Tempuran	Kabupaten Karawang		
21.	SLTP Negeri 3 Cilamaya	-	Cilamaya	Kabupaten Karawang		
22.	SLTP Negeri 4 Ciawi Gebang	-	Ciawi Gebang	Kabupaten Kuningan		
23.	SLTP Negeri 3 Kadugede	-	Kadugede	Kabupaten Kuningan		